



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan
Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal
***(Irregular Migration)* Tahun 2013-2015**

Skripsi

Oleh

Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra

2017330168

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan
Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal
(*Irregular Migration*) Tahun 2013-2015**

Skripsi

Oleh

Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra

2017330168

Pembimbing

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

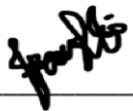
Nama Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra
Nomor Pokok 2017330168
Judul . Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal (*Irregular Migration*) Tahun 2013-2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Sekretaris
Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

: 

Anggota
Mireille Marcia Karrnan, M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra
NPM : 2017330168
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman
Keamanan Sosial untuk Menurunkan Tingkat
Migrasi Ilegal (*Irregular Migration*) Tahun 2013-
2015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juli 2021



Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra

ABSTRAK

Nama : Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra
NPM : 2017330168
Judul : Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal (*Irregular Migration*) Tahun 2013-2015

Australia sebagai negara yang multikultural dan penandatanganan *United Nations Refugee Convention* tahun 1951, telah menjadi salah satu tujuan utama para migran untuk memperoleh perlindungan maupun kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, dominasi Partai Buruh sejak tahun 2008 yang memberikan perlindungan permanen pada pencari suaka dan pengungsi telah melemahkan perbatasan Australia dengan kedatangan migran ilegal yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam rentang tahun 2010-2013 menjadi puncak kedatangan migran ilegal yang berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, Irak dan Sri Lanka. Adapun kekhawatiran dan ketakutan dari masyarakat Australia atas peningkatan ini yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Pemerintah Australia memilih untuk mengadopsi kebijakan garis keras sebagai usaha untuk menghentikan dan menolak kedatangan migran ilegal ke wilayah Australia. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi dan faktor yang mendorong terjadinya sekuritisasi terkait ancaman pada keamanan sosial, sejalan dengan pertanyaan penelitian yang penulis angkat yaitu “Bagaimana keberhasilan proses sekuritisasi dalam menurunkan tingkat migrasi ilegal di Australia pada tahun 2013-2015 sebagai ancaman keamanan sosial?”. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan Teori Sekuritisasi dari Barry Buzan, dkk dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, terdapat temuan bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan berhasil dan faktor-faktor yang mendorong sekuritisasi seperti: perpaduan konsep keamanan, keterkaitan masalah keamanan, peran aktor yang berpengaruh kuat baik negara maupun non-negara, serta peran sistem politik negara dapat dibuktikan, namun ancaman dari kedatangan migran ilegal tidak serta-merta hanya mengancam perbatasan Australia.

Kata Kunci: Australia, Migran Ilegal, Sekuritisasi, Keamanan Sosial.

ABSTRACT

Name : Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra
Student Number : 2017330168
Title : *Securitization in Australia related to the Threats on Societal Security to Reduce Irregular Migration Rates in 2013-2015*

Australia as a multicultural country and a signatory to the United Nations Refugee Convention in 1951, has become one of the main destinations for migrants to obtain protection and opportunities to have a decent work. However, the dominance of the Labor Party since 2008 which provides permanent protection to asylum seekers and refugees has weakened Australia's borders with the arrival of illegal migrants has significantly escalated more than the previous years. The 2010-2013 period was the peak of the arrival of illegal migrants from Middle Eastern countries such as Afghanistan, Iran, Iraq and Sri Lanka. As for the concerns and fears of the Australian people over this increase that threatens their survival. The Australian government chose to adopt a hardline policy as an effort to stop and deny the arrival of illegal migrants into Australian territory. Thus, this study aims to analyze the securitization process and the factors that encourage securitization related to threats to societal security, in line within the research question that arise, "How successful is the securitization process in reducing the level of irregular migration in Australia amongst 2013-2015 as a threat to societal security?". In answering these research questions, the author uses the Theory of Securitization by Barry Buzan, et al with a qualitative research approach that uses secondary data techniques. Based on the research, there are findings that the securitization process was successful and the factors that encourage securitization such as: the combination of security concepts, the relevance of security issues, the role of actors who have strong influence on both state and non-state actors, and the role of the state political system can be proven, but the threat from the arrival of illegal migrants does not necessarily only threaten the Australian border.

Keywords: *Australia, Illegal Migrant, Securitization, Societal Security*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal (*Irregular Migration*) Tahun 2013-2015.” Penyelesaian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini membahas mengenai proses sekuritisasi terkait ancaman pada keamanan sosial untuk menurunkan tingkat migrasi ilegal di tahun 2013-2015. Fenomena kedatangan migran ilegal yang dipelopori oleh globalisasi, peperangan dan konflik menimbulkan ancaman tersendiri bagi pemerintah Australia maupun masyarakatnya. Upaya sekuritisasi pun harus dilaksanakan pada pemerintahan Tony Abbott yang dipercayai dapat menurunkan angka migrasi ilegal. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan juga para pihak yang sedang merancang topik yang serupa.

Ucapan terimakasih harus penulis berikan sebesar-besarnya pada kedua orang tua, dan khususnya dosen pembimbing skripsi, Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han), atas segala masukan, arahan, dan senantiasanya memberikan dukungan serta kesabaran untuk membimbing agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis ingin meminta maaf apabila dalam penelitian ini masih ada kekurangan, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis akan terbuka terhadap segala bentuk kritikan dan masukan yang berguna untuk menyempurnakan penelitian ini.

Bandung, 9 Juli 2021



Zirrasyi Ramadhani Jeffry Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam proses penyelesaian penelitian ini, yang selalu memberikan dukungan, baik secara moral maupun fisik, doa, dan memberikan waktu dan tenaga untuk keberadaan mereka didalam hidup penulis.

Pertama, penulis harus sampaikan rasa bersyukur dan terimakasih kepada **Allah SWT** yang tidak pernah tertidur, dan selalu menemani penulis dalam kondisi apapun, serta memberikan kehidupan yang penuh dengan makna, dan menjadi tempat untuk penulis berlindung, mencari ketenangan serta pencerahan dalam menulis penelitian ini.

Kedua, harus berterimakasih kepada panutan hidup penulis yaitu kedua orang tua, **Marsma TNI. Jeffry Yandi** dan **dr. Chrisna Edie Damayanti**, yang selalu memberikan kepercayaannya pada anaknya yang paling bungsu ini, mendoakan kesuksesan penulis, memberikan kebebasan untuk memilih meskipun kerap kali mengecewakannya, namun tiada penyesalan atau amarah yang tertuju pada penulis dan selalu mendukung jalan pilihan penulis. Tidak ada sedetikpun yang terlewatkan untuk selalu memberikan rasa kasih sayang, motivasi, perhatian, serta materi pada penulis. Peran mereka sangat mendukung dalam proses pembuatan penelitian ini, penulis berjanji akan membanggakan kalian berdua.

Ketiga, kepada kakak-kakak penulis yang telah hadir dalam meramaikan hidup penulis, menjadi sosok kakak yang penulis inginkan, sebagai teman bermain sekaligus kakak yang patut dihormati. Terimakasih **Zalika Dwi Affryna, S.IP.** kakak perempuan yang kuat, dan membantu penulis dalam serangkaian kegiatan perkuliahan, serta membantu menyemangati, dan mengajari format-format penelitian ini. Terimakasih **Muhammad Alfi Respati**, sudah meringankan penulis dalam mengerjakan penelitian ini dengan kehadiranmu di rumah, teman bermain yang selalu sedia menemani penulis dalam suka dan duka.

Keempat, kepada dosen pembimbing penulis yaitu Mba **Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)** yang tidak ada capek-capeknya membimbing penulis dan rekan-rekan lainnya. Meskipun situasi seperti pandemi ini, beliau selalu

sabar dan teliti dalam meluruskan masalah proses penyusunan skripsi sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Dengan *fast-response* dan *flexible time* beliau, memudahkan penulis untuk berkonsultasi dan menyelesaikan penelitian ini, tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Kelima, kepada kekasih saya **Siti Kamilah Afifah Valerianty** yang selalu memberikan *moral support* dengan mengatakan “*law of attraction*” bahwa penulis harus selalu percaya pada dirinya sendiri dan jangan sekalipun meragukan diri sendiri, karena pada akhirnya pasti ada imbalannya. Terimakasih juga untuk *late night calls* nya dalam usaha untuk menemani penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Terakhir, kepada **Mario Arnesto Onggang**, teman seperjuangan yang selalu siap sedia untuk membantu penulis, mendengarkan keluhan, dan cerita-cerita lainnya. Teman yang selalu bersama saling bahu-membahu. Terimakasih kawan, *this is our last dance*. Terimakasih juga untuk **Kevin Wener, S.Hub.Int, Muhammad Rizki, S.Hub.Int, Calvin Immanuel, Irvin Fadhilah**, dan **Feket Sundala** lainnya yang selalu menghibur dengan canda dan tawa. *See you soon bro*. Dan untuk teman-teman SMA yang selalu ada disaat penulis pulang dari Bandung ke Jakarta maupun saat bermain basket bersama, **Gibby, Radit, AW, Harlan, Ariq**, dan **Aldo**. Terimakasih banyak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR AKRONIM.....	x
BAB I: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian.....	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II: Fenomena <i>Irregular Migration</i> dan Tindakan Pemerintah Australia dalam Menanggapi Ancaman terhadap Masyarakat Australia	23
2.1 Munculnya <i>Irregular Migration</i> Sebagai Fenomena Global.....	23
2.1.1 Asal Usul Masuknya Fenomena Migrasi Ilegal di Australia	25
2.2 Persepsi Masyarakat Australia terkait Keberadaan Migran	33
2.3 Tindakan Pemerintah dalam Mengontrol Migran Ilegal di Australia	42
2.3.1 Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> dan Strategi “ <i>Turn Back Boats</i> ”	46

2.3.2	Membalikkan Kebijakan <i>Temporary Protection Visas</i> era John Howard	51
2.3.3	Menetapkan Aturan <i>Regional Resettlement</i> dan <i>Offshore Processing</i>	52
2.3.4	Memperkenalkan <i>New Fast Track Assessment</i> dan <i>Removal Process</i>	54
2.4	Tanggapan Tony Abbott terkait Keberadaan Migrasi Ilegal di Australia ..	56
2.4.1	Tanggapan Tony Abbott Saat Pemilihan Umum 2013	59
2.4.2	Tanggapan Tony Abbott Saat <i>National Security Statement</i> Tahun 2015	60
BAB III: Keberhasilan Proses Sekuritisasi di Australia meliputi Faktor Sekuritisasi untuk Membatasi, Mengontrol, dan Menghadapi Masuknya Migran Ilegal		62
3.1	Kedatangan Migran Ilegal Sebagai Ancaman Eksistensial Bagi Australia	63
3.1.1	Kedatangan Migran Ilegal Sebagai Ancaman Keamanan Sosial....	68
3.2	<i>Speech Act</i> Tony Abbott mengenai Kedatangan Migran Ilegal Sebagai Ancaman Eksistensial di Australia	74
3.3	<i>Operation Sovereign Border</i> sebagai <i>Emergency Response</i> dari Pemerintah Australia mengenai Keberadaan Migran	83
3.4	Dampak Hubungan Antar Unit terhadap Implementasi Kebijakan OSB	91
3.5	Faktor-faktor yang Mendorong Sekuritisasi Migrasi di Australia	95
BAB IV: Kesimpulan		101
DAFTAR PUSTAKA		105

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah Kedatangan Migran tahun 2008-2013	44
TABEL 2.2 Jumlah Perahu yang Dikembalikan Selama OSB	49
TABEL 2.3 Komentar Tony Abbott pada Peluncuran Kampanye Partai Koalisi tahun 2010	57
TABEL 2.4 Komentar Tony Abbott dalam Pemilihan Umum Tahun 2013..	59
TABEL 2.5 Komentar Tony Abbott pada Peluncuran <i>National Security Statement</i> Tahun 2015	61

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 Aspek Kedekatan Sosial	31
GRAFIK 2.2 Aspek Hubungan Migran dengan Diaspora Australia	32
GRAFIK 2.3 Aspek Kondisi yang Mendesak	33

DAFTAR AKRONIM

ACBPS	Australian Customs and Border Protection Service
ADF	Australia Defence Force
ALP	Australia Labor Party
ASIO	Australia Security Intelligence Organisation
BVE	Bridging Visa E
CAT	Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
DIBP	Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IDP	Internally Displaced Persons
IMA	Irregular Maritime Arrivals
IOM	International Organization for Migration
MRT	Migration Review Tribunal
MYEFO	Mid-year Economic Fiscal Outlook
NGO	Non-Government Organization
OSB	Operation Sovereign Borders
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNG	Papua Nugini
RRT	Refugee Review Tribunal
RSD	Refugee Status Determination
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAS	Australian Special Air Service
SIEV	Suspected Illegal Entry Vessels
TPV	Temporary Protection Visa
UMA	Unauthorised Maritime Arrivals
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migran didefinisikan sebagai perpindahan individu yang melintasi perbatasan internasional atau di dalam negara dengan jarak tempuh jauh dari asalnya.¹ Fenomena perpindahan migran dalam skala besar telah menjadi isu keamanan yang mengalami perluasan cakupan baru yang perlu diperhatikan pada abad ke-21 ini. Migran diketahui memiliki alasannya tersendiri, sebagian besar karena kondisi politik dan keamanan negaranya yang sudah tidak aman untuk ditempati. Sehingga, keputusan untuk meninggalkan negara asalnya merupakan pilihan terbaik, hal ini dikenal sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Benua Australia menjadi tempat tujuan untuk para migran, lantaran karena negara Australia dibangun atas fondasi migrasi, dimana tingginya pertumbuhan populasi Australia secara historis berasal dari peningkatan alami asal penduduknya dan migrasi dari luar negeri. Salah satu migrasi tertinggi pada waktunya adalah melalui sejarah panjang periode paska-Perang Dunia kedua yang menjadikan benua Australia tempat masuknya para imigran Inggris dan Irlandia yang terlantar di Eropa Timur.² Ditambah dengan mendukungnya kondisi geopolitik benua Australia yang memiliki letak yang terisolasi dari para kekuatan sekutu pada Perang Dunia

¹ "Migration," *United Nations* (United Nations), diakses pada 21 Januari, 2021, <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/>.

² Graeme Hugo, "International Migration Transforms Australia," *Population Reference Bureau*, diakses pada 16 September, 2020, <https://www.prb.org/internationalmigrationtransformsaustralia/>

kedua. Mengacu pada data dari *Australian Bureau of Statistics*, dalam kurun waktu 2018-2019, terdapat lebih dari 7,5 juta migran yang tinggal di Australia dan terus meningkat setiap tahunnya.³ Hal ini menandakan bila Australia memiliki penduduk yang beragam budaya dan bahasa yang telah dibentuk oleh kedatangan migrasi selama bertahun-tahun terakhir.

Kehadiran populasi masyarakat yang multikultural di Australia menumbuhkan faktor lainnya dalam menarik perhatian migran asing yaitu kecenderungan adanya kelompok migran yang memiliki persamaan dalam budaya dan bahasa. Kecenderungan kelompok ini kemudian dapat memudahkan migran untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan ekonomi Australia, bahkan beberapa diantaranya yang sebelumnya sudah melakukan migrasi dapat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, mencari perumahan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.⁴

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kedatangan kapal migran gelap yang kebanyakan adalah pencari suaka dan pengungsi telah menjadi masalah kontestasi politik yang signifikan di Australia selama 16 tahun terakhir, hal ini karena timbulnya momentum untuk memanfaatkan isu kedatangan kapal pencari suaka dalam pemilihan umum Australia yang dimulai pada periode John Howard tahun 2001 dari Partai Liberal.⁵ Tercatat pada tahun 2013, sebanyak 20,587 orang dengan

³ "Migration, Australia," *Australia Bureau of Statistics*, diakses pada 16 September, 2020, <https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/migration-australia/latest-release#key-statistics>

⁴ *Ibid.*, Graeme Hugo.

⁵ John Minns, Kieran Bradley, dan Fabricio H. Chagas-Bastos, "Australia's Refugee Policy: Not a Model for the World," *International Studies*, No. 55, (Januari, 2018): hal. 2

300 perahu ilegal telah memasuki wilayah lepas pantai Australia di pulau Christmas dan Ashmore Reef dan ditangkap oleh pihak Australia.⁶ Beberapa ribu migran gelap berasal dari Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, dan Sri Lanka.⁷ Rasa simpati pun juga muncul dari kalangan pendukung pro-pengungsi atas penderitaan yang dialami oleh migran ketika permasalahan dimulai. Akan tetapi, sejak 2001 dan seterusnya pemerintah Australia telah mengadopsi kebijakan ketat untuk menghentikan perkembangan arus pencari suaka, termasuk menahannya tanpa batas waktu yang ditentukan di pusat penahanan yang berada di pinggir pantai.⁸

Arus migrasi dari pencari suaka dan pengungsi ke Australia telah menyadarkan pemerintahan Australia mengenai tren peningkatan *irregular migration* yang terjadi dan menimbulkan dampak pada masyarakat Australia.⁹ Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan garis keras yang diadopsi Australia untuk meminimalisir arus migrasi penelitian yang dilakukan penulis akan berjudul **“Sekuritisasi di Australia terkait Ancaman Keamanan Sosial untuk Menurunkan Tingkat Migrasi Ilegal (*Irregular Migration*) Tahun 2013-2015”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

⁶ Ibid.

⁷ Andreas Schloenhardt, dan Colin Craig, “Turning Back the Boats’: Australia’s Interdiction of Irregular Migrants at Sea,” *International Journal of Refugee Law*, No. 4 (October, 2015): hal. 536.

⁸ Ibid., John Minns, Kieran Bradley, dan Fabricio H. Chagas-Bastos.

⁹ Janet Phillips, “Asylum seekers and refugees: what are the facts?,” *Department of Parliamentary Services, Social Policy Section* (Januari 2011): hal. 1.

Konflik, peperangan, dan globalisasi mendorong peningkatan arus migrasi yang mempengaruhi banyak negara dalam hal mengambil keputusan yang berpusat secara domestik dan regional. Besarnya arus migran yang datang ke benua Australia dari tahun ke tahun menyebabkan adanya potensi ancaman bagi pemerintah Australia. Hal ini berawal dari kebijakan migrasi Australia yang lebih rentan pada tahun 1960-an, sehingga multikulturalisme telah menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan dan identitas, menjadikan Australia sebagai salah satu negara yang memiliki rasio kelahiran dari luar negeri tertinggi dalam penduduknya.¹⁰

Sebagai negara maju dan termasuk penandatangan *United Nations Refugee Convention* tahun 1951, Australia memang tampak sebagai tujuan yang menarik bagi para pencari suaka dan migran gelap lainnya.¹¹ Akan tetapi, pada masa pemerintahan Tony Abbott, kebijakan Australia justru bertentangan dengan konvensi yang sudah disetujui, padahal menurut *Convention of Refugees 1951*, pengungsi mendapatkan haknya untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku, termasuk menerapkan prinsip *non-refoulement* yang menegaskan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara asal mereka karena dapat mengancam kehidupan atau kebebasan mereka.¹²

¹⁰ Farida Fozdar dan Susan Banki, "Settling Refugees in Australia: achievements and challenges," *International Journal on Migration and Border Studies*, No.1, (Januari, 2017): hal. 45.

¹¹ Emma Larking, "Controlling Irregular Migration in the Asia-Pacific: Is Australia Acting against its Own Interests," *Asia & The Pacific Policy Studies*, vol.4, no. 1, hal. 86.

¹² United Nations High Commissioner for Refugees, "The 1951 Refugee Convention," diakses pada 20 Februari 2021, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

Banyaknya migran yang berdatangan dengan berbagai latar belakang identitas seperti bahasa dan budaya, memunculkan kekhawatiran atas penerimaan publik terhadap beberapa kelompok migran.¹³ Potensi munculnya ancaman kedaulatan negara Australia seperti konflik sosial yang mungkin terjadi juga merupakan pengaruh dari banyaknya migran yang berdatangan. Hal ini mendorong Australia menuju pada potensi ancaman integrasi masyarakat domestik, dimana kedatangan banyaknya migran memiliki keterkaitan dengan usaha untuk menghilangkan keaslian dari penduduk Australia, baik secara fisik maupun sosial.¹⁴ Ada pula yang berfikir bahwa menekankan titik fokus pada isu integrasi yang didorong oleh kebijakan, bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian yang “baik” dengan memandang pengungsi sebagai “jenis tertentu” dalam hal etnis yang memerlukan kebutuhan khusus (misalnya kesehatan dan ekonomi).¹⁵

Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dalam hal melindungi perbatasan dengan menolak kedatangan migran, guna mencegah terjadinya ancaman lintas batas yang sedang berkembang yaitu terorisme. Pencetus dari tindakan menolak kedatangan migran datang dari adanya asumsi yang mengatakan bahwa para migran dan pencari suaka dengan latar belakang yang tidak diketahui dan tidak dikenal, menimbulkan pertanyaan apakah mereka memiliki hubungan

¹³ Harriet Spinks, “Australia's settlement services for migrants and refugees,” *Parliament of Australia*, Research Paper No. 29, April, 2009, diakses pada 20 September 2020, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0809/09rp29.

¹⁴ Ibid., Farida Fozdar dan Susan Banki.

¹⁵ Ibid.

dengan para kelompok terorisme atau tidak.¹⁶ Tindakan pencegahan ini merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar munculnya perkembangan kegiatan kriminal yang bersifat lintas batas, dipicu oleh ancaman terhadap masyarakat di masing-masing negara, termasuk kasus migrasi yang telah menjadi masalah domestik, sehingga diperlukan kerjasama regional maupun internasional untuk melindungi perbatasan dan teritorial negara serta kedaulatan nasionalnya.

Besarnya peningkatan arus migrasi yang terjadi secara global terutama di Australia, menimbulkan berbagai permasalahan dan potensi ancaman secara sosial serta politik yang harus dihadapi baik dari segi domestik maupun internasional. Atas kondisi ini, pada pemilihan umum di Australia tahun 2010, Tony Abbott maju sebagai kandidat dan menyampaikan kampanye perihal migrasi ilegal serta berjanji untuk menghentikan perahu-perahu yang masuk ke Australia secara ilegal. Ia menyatakan bahwa *“Kita harus menawarkan kepada masyarakat Australia cara yang lebih baik. Jadi saya katakan lagi, jika terpilih pemerintahan Koalisi akan mengakhiri pemborosan, membayar kembali utang, menghentikan pajak baru yang besar, **menghentikan perahu** dan membantu keluarga yang berjuang dan kami akan melakukannya sejak hari pertama.”*¹⁷ Meskipun kalah perolehan suara dari Julia Gillard, Tony Abbott kembali mencalonkan dirinya pada tahun 2013 dan berhasil memenangkannya. Ia pun tetap memegang janjinya untuk mengamankan

¹⁶ Matthew Cameron, “From ‘Queue Jumpers’ to ‘Absolute Scum of the Earth’: Refugee and Organised Criminal Deviance in Australian Asylum Policy,” *Australian Journal of Politics and History*, (2013): 244.

¹⁷ “Tony Abbott, 2010,” *Australian Federal*, diakses pada 21 Januari, 2021, <https://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2010-tony-abbott>.

masyarakat Australia dari ancaman migrasi dan berniat akan menggunakan unsur militeristik dalam kebijakannya.

Keputusan pemerintah Australia dalam menolak kedatangan migran sejak tahun 2001 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk dipelajari dan dipahami lebih dalam. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis akan meneliti keterkaitan dari proses sekuritisasi meliputi faktor sekuritisasi dan ancaman keamanan sosial di Australia pada periode waktu 2013 hingga 2015.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara komprehensif akan membahas mengenai proses sekuritisasi dan meliputi faktor yang mendorong sekuritisasi. Pada akhirnya tindakan sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah Australia yang memiliki keterkaitan dengan ancaman keamanan sosial akibat kedatangan migran yang masif. Rentang waktu yang penulis ingin fokuskan dimulai pada tahun 2013 hingga 2015. Pada rentang waktu tersebut, pemerintah Australia dibawah Perdana Menteri Tony Abbott mengeluarkan beberapa tindakan dan menjalankan kebijakan yang diutarakan untuk menurunkan tingkat migrasi ilegal yang masuk ke teritorial Australia.

1.2.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dijabarkan pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka penulis akan memutuskan sebuah pertanyaan penelitian berupa: **“Bagaimana keberhasilan proses**

sekuritisasi dalam menurunkan tingkat migrasi ilegal di Australia pada tahun 2013-2015 sebagai ancaman keamanan sosial?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara komprehensif mengenai keberhasilan proses sekuritisasi dan ancaman pada keamanan sosial yang terjadi di Australia yang secara sepenuhnya mulai mengancam keutuhan kedaulatan serta keberlangsungan masyarakat Australia. Terus terang, penulis ingin meneliti proses migrasi ilegal yang pada akhirnya mengancam keamanan nasional Australia sehingga mengeluarkan tindakan sekuritisasi yang meliputi tanggapan Tony Abbott selaku Perdana Menteri tahun 2013-2015, respons dan tindakan serta strategi “*Turn Back Boats*” pemerintah Australia untuk mengurangi migrasi ilegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengedukasi pembaca mengenai proses sekuritisasi dan ancaman keamanan sosial yang terjadi di Australia, sekaligus dapat dijadikan sumber utama atau referensi bagi pembaca untuk mendapat informasi atau melakukan penelitian lebih lanjut. Tindakan sekuritisasi meliputi munculnya ancaman, respon terhadap ancaman baik melalui tanggapan dari tokoh negara atau pembuatan kebijakan dan peraturan. Sehingga, diharapkan dengan mengetahui upaya yang dijabarkan penulis, pembaca dapat dengan mudah mengerti mengenai sekuritisasi, dan mengetahui secara benar proses sekuritisasi beserta tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sebuah negara.

1.4 Kajian Literatur

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis ingin memegang pemahaman mengenai sekuritisasi migrasi yang sudah dibahas oleh beberapa kalangan akademisi dan yang akan dibuktikan oleh penulis pada bab selanjutnya. Menurut Sartika Soesilowati dalam jurnalnya yang berjudul “Sekuritisasi ‘Manusia Perahu’: Efektifkah?” menjelaskannya dengan menggunakan studi kasus pencari suaka di Australia yang menimbulkan dampak buruk pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dalam hal melihat ancaman kedatangan perahu pencari suaka, dapat dikatakan pendekatan sekuritisasi merupakan hal yang tepat dalam menggambarkan pemberlakuan kebijakan pemerintah Australia terhadap kelompok pencari suaka. Namun menurut Sartika Soesilowati, konstruksi ancaman dari pendekatan sekuritisasi migrasi berdampak pada penanganan permasalahan yang tidak efektif dalam mengurangi gelombang pencari suaka serta kontradiktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan.¹⁸ Selain tidak efektif dalam menangani masalah migrasi, sekuritisasi migrasi juga memiliki peluang untuk menciptakan bentuk rasisme yang paling modern.

Lewat jurnal yang ditulis oleh Maggie Ibrahim yang berjudul “*The Securitization of Migration: A Racial Discourse*” ia berpendapat bahwa proses dimana konsep keamanan berkembang dan menjadi luas hingga memasuki aspek manusia (*people-centered*), telah merubah migrasi sebagai sebuah ancaman keamanan baru. Oleh karena itu, sebuah negara perlu memberikan dan memastikan

¹⁸ Sartika Soesilowati, “Sekuritisasi ‘Manusia Perahu’: Efektifkah?”, *Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Global & Strategis*, Th. 8, No. 1, (Januari, 2011), hal. 143.

keamanan bagi penduduknya dengan mengembangkan tradisi dan sistem keadilan untuk menjamin keamanan dan stabilitas suatu negara. Pendatang seperti pencari suaka dan pengungsi yang memiliki latar belakang budaya serta bahasa yang berbeda dilihat sebagai penyebab ketidakseimbangan bangsa. Sehingga, sangat rasional jika melakukan pengucilan terhadap kelompok budaya lain. Bentuk pengucilan kelompok dan tindakan diskriminatif berdasarkan perbedaan budaya merupakan sikap negatif terhadap para pendatang yang disebut sebagai rasisme melalui proses sekuritisasi migrasi.¹⁹

Selanjutnya, sekuritisasi dianggap dapat dimanipulasi yang tersaji dalam jurnal “*A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security*” yang ditulis oleh Catherine Charrett. Ia membahas bahwa negara memiliki kapasitas untuk memanipulasi proses sekuritisasi terutama melalui sekuritisasi migrasi. Hal ini karena, para aktor/elit negara dapat memanfaatkan posisi birokrasinya untuk menciptakan kebenaran mengenai ancaman terhadap negara dan dapat mengarangnya atau memperburuknya untuk melegitimasi *securitizing move*-nya. Menurutnya, politisi merasa tidak mampu untuk menegakkan integritas badan nasional yang diwakili, sehingga melahirkan usaha negatif yaitu sekuritisasi migrasi, untuk menegaskan kembali kontrol dan integritas politik mereka. Oleh karena itu, negara atau aktor/elit dapat menggunakan proses sekuritisasi untuk memajukan agenda politik mereka sendiri atau

¹⁹ Maggie Ibrahim, “The Securitization of Migration: A Racial Discourse,” *International Migration*, Vol. 43 (5), (2005), hal. 166-168

meningkatkan kekuatan struktural mereka seperti dengan menggunakan sekuritisasi migrasi sebagai janji elektoral.²⁰

Sedangkan, Elisabeth Farny menambahkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Implications of the Securitisation of Migration*” dengan menggunakan studi kasus Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Pada kasus di AS, ia mengatakan bahwa sekuritisasi migrasi sebelumnya tidak pernah muncul atau terkonstruksi sebagai ancaman bagi identitas nasional, sampai akhirnya fenomena 9/11 terjadi menyebabkan migrasi muncul sebagai ancaman keamanan di AS, terutama ancaman terhadap keamanan sosialnya.²¹ Lalu, pada kasus Uni Eropa, faktor utama dalam melakukan sekuritisasi migrasi adalah untuk melindungi identitas dan budaya Eropa yang lahir atas konsep “*Fortress Europe*” dengan membatasi masuknya di perbatasan dan adanya *border management*. Adapula argumen bahwa migran berpotensi mengancam ekonomi Uni Eropa, oleh karena itu menjadi faktor yang melegitimasi pengembangan kebijakan migrasi dan menjadikan migrasi sebagai masalah keamanan.²² Maka, dengan itu dapat dikatakan bahwa sekuritisasi migrasi adalah usaha untuk mengamankan negara, dan warga negara didalamnya, serta kepentingan regional atas munculnya ancaman terhadap keamanan nasional dan sosial.

²⁰ Catherine Charrett, “A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security”, *International Catalan Institute for Peace*, (Desember, 2009), hal. 26-27

²¹ Elisabeth Farny, “Implications of the Securitisation of Migration,” *E-International Relations*, University of Leicester, 2016, hal. 2.

²² *Ibid.*

Jef Huysmans menambahkan dalam jurnalnya yang berjudul “*The European Union and the Securitization of Migration*” bahwa pembahasan mengenai kebijakan keamanan di bidang migrasi seringkali disajikan sebagai respon terhadap masalah ketertiban umum dan stabilitas domestik akibat dari peningkatan jumlah migran ilegal dan pencari suaka. Dan kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk melindungi negara dan masyarakatnya dari bahaya yang terkait dengan invasi migran ilegal dan pencari suaka. Peran aktor dalam mengkonstruksi masalah juga menyebabkan migran, pencari suaka dan pengungsi terjebak ke dalam masalah keamanan. Menurutnya, migrasi diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang melemahkan tradisi dan homogenitas masyarakat serta membahayakan kelangsungan hidup komunitas suatu bangsa. Sifat multikulturalisme ini disinyalir dapat menyebabkan disintegrasi masyarakat atau versi terkenal adalah *The Clash of Civilization*, yang mengidentifikasi bahwa kehadiran budaya lain membahayakan kelangsungan hidup budaya lokal. Oleh karena itu, Huysmans berpendapat bahwa sekuritisasi migrasi adalah efek struktural dari tindakan yang beragam, tergantung bagaimana hubungan antara aktor dan tindakan (kebijakan) yang mereka lakukan.²³

Berdasarkan kajian literatur diatas yang mencerminkan dua posisi yaitu kontra dan pro terhadap sekuritisasi migrasi yang ingin penulis pahami. Dalam melihat sekuritisasi migrasi, penulis memposisikan dirinya sebagai pro terhadap sekuritisasi migrasi. Hal ini karena sebuah perjalanan panjang dari perspektif keamanan yang

²³ Jef Huysmans, “The European Union and the Securitization of Migration,” *Journal of Common Market Studies* Vol. 38, No. 5, University of Kent, (Desember, 2000), hal. 757-758

sudah meluas dari awalnya antar negara, hingga menjadi antar kelompok dan individu. Belum termasuk perspektif ancaman yang pada mulanya adalah negara antar negara hingga manusia didalamnya dapat terancam oleh manusia lain, dan juga wabah penyakit, kerusakan lingkungan, kekurangan pangan, ekonomi, serta bencana alam. Di dalam dunia yang moderen ini, bukan menjadi hal yang fatal apabila ancaman dapat datang dari manapun. Seperti yang dikatakan Huysmans bahwa sekuritisasi migrasi adalah efek struktural dari tindakan yang beragam, dengan kata lain adalah sekuritisasi migrasi terjadi bukan sekedar persoalan kedatangan migran baik itu pencari suaka atau pengungsi, melainkan terjadinya sekuritisasi migrasi akibat dari beragam implikasi buruk yang terjadi dengan adanya kedatangan migran. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji faktor terjadinya sekuritisasi terhadap migrasi di Australia dan mengapa mengancam keamanan sosial masyarakat Australia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penulis akan menggunakan teori dan beberapa konsep guna menjawab pertanyaan penelitian serta menjadi panduan untuk menganalisis kedepannya. Penulis akan menggunakan Teori Sekuritisasi dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde yang diusung oleh Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*) sebagai landasan utama dalam menganalisis penelitian ini, diikuti dengan beberapa konsep dan faktor seperti konsep keamanan sosial oleh Ole Wæver, dan faktor yang mempengaruhi sekuritisasi oleh Mely Caballero-Anthony.

Pasca Perang Dingin, situasi politik internasional telah membentuk konsep keamanan baru yang dinamakan keamanan non-tradisional. Hal ini ditandai setelah

masa peperangan usai, dimana terlihat jelas bahwa isu-isu non-militer mulai bermunculan di berbagai negara berkembang. Peristiwa ini terjadi karena pada saat Perang Dunia I dan II hingga Perang Dingin, kajian keamanan cenderung bersifat etnosentris yang hanya berputar pada kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Eropa, sehingga permasalahan keamanan yang dialami negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga itu diabaikan.²⁴ Beberapa masalah keamanan yang muncul di dunia ketiga seperti: wabah penyakit pandemik, kriminalitas transnasional, kerusakan lingkungan, separatisme, konflik internal, konflik identitas, dan bencana alam yang dapat terlihat kaitannya dengan dimensi ekonomi, identitas, hingga ekologis, dan dapat mempengaruhi isu keamanan nasional serta regional.²⁵ Hal ini tentunya telah mendorong pemahaman baru tentang konsep keamanan bagi negara maju maupun negara berkembang pada isu-isu non-militer.

Berangkat dari berkembangnya isu-isu non-militer yang telah tumbuh dan mengubah perspektif ancaman sebagai perluasan dari konsep keamanan. Penting untuk dipahami apa itu konsep keamanan yang diutarakan oleh Barry Buzan, dkk dalam buku "*Security: A New Framework for Analysis*". Keamanan dalam konteks hubungan internasional memiliki arti pemahaman yang lebih ekstrim karena berakar pada tradisi politik kekuasaan. Oleh karenanya, keamanan internasional dikenal dengan pendekatannya pada tradisional militer-politik, yang memiliki keterkaitan erat dengan kelangsungan hidup atau *survival*. Dengan ini, pemilik

²⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 183

²⁵ Ibid.

otoritas tertinggi dalam sebuah negara dapat membenarkan penggunaan tindakan luar biasa, dan memobilisasi atau mengambil kekuasaan khusus untuk menangani *existential threat*.²⁶ Hal ini karena pernyataan “keamanan” telah mengindikasikan *emergency response* untuk segera menghentikan perkembangan ancaman, dengan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Berkaitan dengan pernyataan “keamanan”, penggunaan pendekatan sekuritisasi dapat dilihat sebagai versi dari politisasi yang lebih ekstrem, karena masalah disajikan sebagai bentuk *existential threat*, yang membutuhkan *emergency response* atau tindakan darurat dan menjustifikasi tindakan di luar batas normal prosedur politik.²⁷

Teori Sekuritisasi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tepat mengenai siapa yang melakukan sekuritisasi, tentang masalah (ancaman) apa, untuk siapa (objek rujukan), mengapa, hasilnya apa, dan atas dasar kondisi apa melakukan sekuritisasi.²⁸ Adapun tiga komponen proses sekuritisasi: suatu isu disajikan sebagai *existential threat*, perlunya *emergency response* dalam menangani isu keamanan, dan efek pada hubungan antar unit dengan melanggar aturan.²⁹

Sekuritisasi dibentuk oleh pembentuk intersubjektif dari *existential threat* dengan kegunaannya yang memiliki dampak politik yang substansial. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa “keamanan” merupakan praktik *self-referential* karena dalam praktik ini, apabila suatu isu lebih penting dari yang lain, maka harus

²⁶ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (London, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hal. 21

²⁷ *Ibid.*, hal. 23-24

²⁸ *Ibid.*, hal. 32

²⁹ *Ibid.*, hal. 26

menjadi prioritas mutlak.³⁰ Sehingga, dengan argumen dari prioritas dan urgensi seperti itu bisa menjadi sebuah isu keamanan, karena isu tersebut disajikan sebagai bentuk *existential threat*. Lalu, *securitizing actor* dapat berargumen bahwa ada sesuatu melebihi praktek politik normal dan mengganggu seluruh proses kepentingannya, maka, aktor perlu mengambil tindakan *emergency response* untuk menangani *existential threat*.³¹ Dengan ini, aktor dapat mengklaim legitimasinya untuk menangani masalah tersebut melalui cara yang luar biasa, memobilisasi atau mengambil kekuasaan khusus, mengerahkan instrumen-instrumen kekuatan. Aktor juga memiliki hak untuk melanggar aturan politik dengan cara merahasiakan sesuatu, memungut pajak atau melaksanakan wajib militer, memlimitasi hak-hak warga negaranya, dan mementingkan energi dan sumber daya manusia pada tugas tertentu.³²

Penyajian suatu isu menjadi *existential threat* yang dilakukan oleh *securitizing actor* adalah langkah sekuritisasi atau *securitizing move*. *Securitizing move* membentuk tindakan keamanan yang dilakukan secara internal dalam sebuah unit, yang dapat menimbulkan gangguan antar unit. Oleh karenanya, biasanya *securitizing actor* akan mengesampingkan aturan agar dapat menangani ancaman dan mengatur tindakannya dengan prioritasnya sendiri.³³

Dalam proses sekuritisasi, penting untuk mencantumkan pembangunan pemahaman bersama dalam mempertimbangkan secara kolektif tentang ancaman.

³⁰ Ibid., hal 24-25

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid., hal. 25-26

Proses tersebut diangkat dari teori bahasa yang dikenal sebagai *Speech Act*, yang merupakan ucapan sebagai tindakan dengan mengucapkan kata-kata sesuatu yang akan dilakukan.³⁴ Menurutnya, *speech act* yang sukses adalah kombinasi dari bahasa dan masyarakat, dimana intisari pidato dapat dimengerti dan diterima oleh kelompok masyarakat. Terdapat dua aspek penting dalam proses *speech act* yaitu internal dan eksternal. Dalam aspek internal penting untuk membentuk masalah keamanan, dengan menggunakan tata bahasa keamanan, dan membangun argumen yang mencakup *existential threat*, *point of no return* dan jalan keluarnya. Aspek ini memerlukan pembagian pada berbagai sektor seperti sektor sosial yang akan berbicara mengenai identitas, sektor politik yang berbicara mengenai pengakuan dan kedaulatan, dan sektor lingkungan mengenai keberlanjutan. Lalu, aspek eksternal dalam *speech act* yang memiliki dua syarat. Salah satunya adalah *securitizing actor* harus memiliki posisi otoritas dalam menyampaikan pesan, dan memiliki penjelasan kondisi ancaman sebagai obyek ancaman keamanan.³⁵

Sebelum melampau lebih jauh, terdapat lima faktor yang mendorong proses sekuritisasi. Pertama, adalah interaksi dari konsep keamanan berbeda yang termasuk membahas konsep keamanan nasional, keamanan secara komprehensif, keamanan manusia, dan keterkaitannya dengan proses sekuritisasi. Kedua, keterkaitan masalah keamanan yang memerlukan analisis bagaimana aktor sekuritisasi memiliki kemampuan untuk menggabungkan masalah yang darurat (*emerging problem*) yang belum pernah di *securitized* dengan isu yang sudah

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., hal. 32-33

diketahui atau dikenal sebagai ancaman keamanan. Ketiga, pentingnya peran dari aktor yang berpengaruh kuat (aktor negara dan non-negara) untuk memajukan atau mencegah penyebab masalah keamanan non-tradisional. Keempat, peran politik domestik dalam *securitizing* ancaman keamanan non-tradisional dan sejauh mana sistem politik yang berbeda mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sekuritisasi, dengan kata lain kemungkinan keberhasilan sekuritisasi adalah di negara otoriter yang memiliki militer sebagai peran utama dalam politik domestiknya. Terakhir, kelima adalah peran norma internasional yang dapat melihat dan mempromosikan konsepsi yang lebih luas terhadap ancaman keamanan. Oleh karena itu, muncul norma internasional baru yang dapat mengarah pada masalah sekuritisasi yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam ranah keamanan seperti norma *ideas of human rights protection, human security, dan human intervention* yang telah diminta oleh *non-governmental organizations* (NGO's) dan institusi internasional lainnya untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan ekonomi dan isu lainnya.³⁶ Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan empat faktor yang mendorong terjadinya sekuritisasi.

Barry Buzan, dkk telah mempertimbangkan cakupan isu keamanan kedalam lima sektor yang antara lain adalah: Sektor keamanan militer, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada konsep keamanan sosial menurut Ole Wæver. Keamanan sosial didefinisikan oleh Wæver sebagai pertahanan

³⁶ Mely Caballero-Anthony, "Understanding Non-Traditional Security," dalam buku *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, (SAGE Publication, 2016,) hal. 17

identitas terhadap ancaman yang dirasakan, atau lebih tepatnya, pertahanan komunitas terhadap ancaman yang dirasakan identitasnya.³⁷ Ancaman terhadap keamanan sosial muncul ketika adanya potensi untuk mengancam eksistensi keberadaan suatu identitas pada suatu bangsa. Sehingga, *Referent object* dalam sektor ini adalah kelompok yang besar dan memiliki loyalitas serta pengabdian yang dapat menciptakan argumentasi yang kuat secara sosial dengan mendefinisikan bahwa “kita” sedang terancam identitasnya oleh “mereka”.³⁸ Dalam sistem dunia saat ini, *referent object* terpenting dalam keamanan sosial adalah suku, klan, bangsa meliputi etnis minoritas, politik etnis, peradaban, agama, dan ras.³⁹

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat empat masalah umum dalam ranah keamanan sektor sosial yang menjadi ancaman bagi komunitas identitasnya, yaitu (1) Migrasi, keberadaan komunitas X mulai dilemahkan dan dipengaruhi oleh datangnya komunitas Y, identitas komunitas X mengalami perubahan. (2) Kompetisi Horizontal, adalah mengubah cara berpikir suatu bangsa karena adanya pengaruh bahasa dan budaya dari bangsa tetangga. (3) Kompetisi Vertikal, memberikan ancaman terhadap negara X, ketika orang-orang berhenti melihat diri mereka sebagai identitas bangsa X. Hal ini karena terlaksanakannya proyek yang terintegrasi misalnya Uni Eropa, dan proyek separatis-regionalis yang sekaligus mengarahkan identitas mereka ke arah yang lebih luas atau sempit. (4) dan terakhir adalah kemungkinan depopulasi yang menghilangkan suatu bangsa dan identitas

³⁷ Ole Wæver, “The Changing Agenda of Societal Security,” dalam *Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century*, (Berlin: Spinger, 2008), hal. 581

³⁸ Ibid., hal 590

³⁹ Ibid.

tertentu dari wabah penyakit, perang, kelaparan, bencana alam, atau kebijakan pemusnahan.⁴⁰ Berdasarkan ancaman kemanan sosial diatas, masyarakat dapat mengatasi dan menangani ancaman tersebut melalui dua cara, Pertama dengan melakukan aktivitas dari komunitas atau masyarakat yang terancam. Kedua, memindahkan isu dan ancaman tersebut kepada sektor politik dan militer yang menempatkan ancaman sebagai agenda negara. Di tingkat negara, ancaman migrasi dapat diatasi melalui undang-undang dan kontrol perbatasan.⁴¹

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut John Creswell adalah tempat untuk mengeksplorasi dan memahami makna individual atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data melalui pengaturan partisipan, menganalisis data secara induktif yang dibangun melalui tema tertentu (khusus) menjadi tema umum, serta sang peneliti melakukan interpretasi makna dari data yang diperoleh.⁴²

Penulis juga akan menggunakan jenis pendekatan metode kualitatif yang bersifat Studi Kasus. Menurut Joachim K. Blatter, studi kasus adalah pendekatan

⁴⁰ Ibid., hal 584

⁴¹ Ibid., hal 586

⁴² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2009), hal. 4.

penelitian dimana peneliti memilih salah satu atau beberapa contoh fenomena yang dipelajari secara komprehensif.⁴³

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui dua sumber identifikasi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti, dapat berupa observasi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh orang lain, termasuk foto dan bahan visual lainnya.⁴⁴

Penulis akan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data. Sumber dari data sekunder yang penulis gunakan berupa buku, jurnal, artikel, berita, dan laporan baik dalam bentuk visual maupun dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis ingin kaji.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I berisikan “**Pendahuluan**” yang memiliki tujuh sub-bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah (mencakup perumusan dan pembatasan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan terakhir sistematika pembahasan.

⁴³ Joachim K. Blatter, “*Case Study*”, dalam buku *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Vol. 1 & 2, editor Lisa M. Given, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2008), hal. 68.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 232

Bab II “Fenomena *Irregular Migration* di Australia dan Tindakan Pemerintah Australia dalam Menanggapi Ancaman terhadap Masyarakat Australia” pada bab ini akan diawali dengan proses masuknya *irregular migration* di Australia, dan persepsi masyarakat mengenai kedatangan migran ilegal serta bagaimana Australia menempatkan kasus ini sebagai keamanan nasional, lalu pada bab ini pula penulis akan membahas mengenai tindakan dan tanggapan Pemerintah Australia yang merupakan komponen sekuritisasi untuk membatasi serta mengontrol perbatasan terhadap kedatangan migran.

Bab III “Keberhasilan Proses Sekuritisasi di Australia meliputi Faktor Sekuritisasi untuk Membatasi, Mengontrol, dan Menghadapi Masuknya Migran Ilegal” pada bab ini akan menganalisis keberhasilan proses sekuritisasi secara mendalam dan meliputi faktor-faktor yang mendorong sekuritisasi serta keterkaitan migrasi ilegal sebagai masalah keamanan sosial di Australia dan mengapa disebut sebagai masalah keamanan sosial.

Bab IV “Kesimpulan” pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian ini yang merupakan hasil akhir dari kajian.